

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) KEPALA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT

I. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. Urusan Wajib yang Dilaksanakan

Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu Instansi penyelenggara Pemerintahan dan Pembangunan mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang sosial. Dalam menyelenggarakan tugas dimaksud, maka Dinas Sosial mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang sosial;
2. Penyelenggaran urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang sosial;
3. Pembinaan dan fasilitas bidang sosial lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
4. Pelaksanaan kesekretariatan dinas;
5. Pelaksanaan tugas di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitas Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Penanganan Fakir Miskin;
6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sosial; dan
7. Pelaksanaan tugas yang lain diberikan oleh gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

1. Program dan Kegiatan

Berdasarkan kewenangan dan arah kebijakan umum pembangunan bidang kesejahteraan sosial, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2018 yang tertuang dalam dokumen RPJMD 2016-2021, kegiatan pembangunan bidang kesejahteraan sosial mencakup pada 15 (lima belas) program urusan sosial. Adapun Program dan Kegiatan pada urusan wajib bidang sosial sebagai berikut :

a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Program ini terdiri dari 14 (empat belas) kegiatan yang dipergunakan untuk memenuhi belanja pelayanan perkantoran selama 1 tahun. Kegiatan dimaksud sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- 4) Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor;
- 5) Penyediaan Alat Tulis Kantor;

- 6) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- 7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- 8) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- 9) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
- 10) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- 11) Penyediaan Makanan dan Minuman;
- 12) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah;
- 13) Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi;
- 14) Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur.

b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Mencakup 13 (tiga belas) kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;
- 2) Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor;
- 3) Pengadaan Meubeleur;
- 4) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- 5) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
- 6) Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan;
- 7) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
- 8) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor;
- 9) Pemeliharaan Rutin/Berkala Monumen dan Bangunan Sejarah;
- 10) Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan;
- 11) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor;
- 12) Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi;
- 13) Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi;
- 14) Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi.

c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini berisikan kegiatan Pengadaan Pakai Dinas Beserta Perlengkapannya untuk PNS Dinas Sosial dan UPTD yaitu :

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.

d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini berisi kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan yang bertujuan untuk meningkatkan Sumber Daya Aparatur Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dan Sosialisasi Permendagri dan Perpajakan.

- 1) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan;
- e) **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan sebagai berikut :**
 - 1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - 2) Penatausahaan Keuangan SKPD;
 - 3) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - 4) Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD;
 - 5) Penyusunan Sinergitas Program Antar Kab/Kota;
 - 6) Pengelolaan, Pengawasan, dan Pengendalian Aset OPD.
- f) **Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dengan kegiatan sebagai berikut :**
 - 1) Rujukan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;

Adapun bentuk kegiatan yaitu Rujukan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial berupa pemberian rujukan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial se-Sumatera Barat yang dikirim Panti Sosial yang berada di Provinsi Bengkulu guna menjalani rehabilitasi dan pembinaan.
 - 2) Sosialisasi Program Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH);

Anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut sebagai anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak yang menjadi korban dan saksi. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan ABH adapat mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan ABH.
 - 3) Sosialisasi Perda dan Pergub Disabilitas;

Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat wajib memiliki regulasi dalam bentuk Peraturan Gubernur agar kegiatan yang dilaksanakan memiliki pedoman yang terarah dan payung hukum bagi Pemerintah dan masyarakat.

Penyusunan Peraturan Gubernur bertujuan untuk mewujudkan koordinasi dan keterpaduan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/ Kota serta pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas

Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Penyandang Disabilitas bertujuan menyampaikan informasi bahwa untuk menjamin pemenuhan hak dan peran penyandang disabilitas, perlu adanya kepastian hukum sebagai jaminan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Pemantapan Satuan Bakti Pekerja Sosial

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan meningkatnya kualitas Satuan Bakti Pekerja Sosial dalam melaksanakan tugas sebagai pilar-pilar pembangunan kesejahteraan sosial ditengah masyarakat.

g) Program Pembinaan Anak Terlantar

Anak Terlantar merupakan penyebab dominan dari ketidakmampuan orang tua yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Selain itu, akibat orang tua/dan/atau keluarga yang tidak dapat memenuhi kebutuhan anaknya dengan pelbagai alasan menjadikan anak-anak mereka terlantar. Dikategorikan anak terlantar apabila :

- 1) Seseorang berusia 5 – 18 tahun;
- 2) Anak yatim, piatu, yatim piatu maupun masih mempunyai kedua orang tua;
- 3) Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya; dan
- 4) Anak yang lahir karena pemerkosaan, tidak ada yang mengurus dan tidak mendapatkan pendidikan.

Adapun kegiatan Program ini sebagai berikut :

- 1) Pengadaan Kelengkapan Klien;

Pengadaan kelengkapan klien pada PSAABR Budi Utama Lubuk Alung, PSAA Tri Murni, dan PSBR Harapan Padang Panjang sejumlah 455 orang klien terdiri dari 155 orang anak laki-laki dan 300 orang anak perempuan. Kegiatan ini untuk membiayai kebutuhan harian, kebutuhan pakaian sekolah dan penyediaan kebutuhan materi (uang jajan dan uang saku) bagi anak asuh serta anak yang mendapatkan pelayanan keterampilan.

2) Seleksi Penerimaan Calon Klien;

Seleksi penerimaan calon klien dimaksudkan agar klien yang akan diterima pada Panti Sosial PSAABR Budi Utama Lubuk Alung, PSAA Tri Murni, dan PSBR Harapan Padang Panjang telah memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan. Kegiatan ini dilaksanakan terhadap 520 orang anak.

3) Rapat Koordinasi Pelayanan dan Rehabilitasi Kesos Anak;

Rapat Koordinasi Pelayanan dan Rehabilitasi Kesos Anak, bertujuan untuk menyampaikan informasi tentang Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Anak khususnya Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA), Program Kesejahteraan Sosial Bagi Anak Yang Membutuhkan Perlakuan Khusus (AMPK), serta untuk terjalinnya koordinasi antar pengurus panti sosial swasta dengan petugas Dinas Sosial Kab/Kota. Sasaran pada kegiatan ini berjumlah 125 orang.

4) Sehari Bersama Anak;

Sehari Bersama Anak, adalah perwujudan dari Keppres Nomor 4 tahun 1984 tentang Hari Anak Nasional seiring dengan ditetapkannya UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka peringatan Hari Anak Nasional tahun 2018 merupakan momentum yang tepat untuk menggugah dan membangkitkan segenap komponen bangsa (pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua) akan pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak anak, termasuk pemenuhan layanan perlindungan dan kesejahteraannya. Untuk tahun anggaran 2018 jumlah sasaran kegiatan ini sebanyak 200 orang.

Tujuan umum peringatan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta bersama dengan pemerintah dalam menyelenggarakan upaya pembinaan dan pengembangan anak secara integratif holistik dan berkesinambungan serta meningkatkan kesadaran pemerintah, masyarakat, orang tua dan segenap komponen bangsa untuk memenuhi hak-hak anak berdasarkan *Child Right*, dan menghindari anak-anak dari penyiksaan, penelantaran, eksploitasi kekerasan terhadap anak, diskriminasi, pemakaian obat-obatan terlarang, pornografi, dan lain-lain.

5) Tim PIPA (Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak).

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah memberikan verifikasi terhadap anak yang akan dijadikan anak angkat oleh calon orang tua angkat dan agar terjalinnya koordinasi dengan instansi terkait dalam izin pengangkatan anak. Sasaran kegiatan ini adalah 25 orang.

6) Pelatihan Keterampilan dan Praktik Belajar bagi Anak Terlantar (PSAABR Budi Utama Lubuk Alung);

Kegiatan ini dimaksudkan agar anak terlantar laki-laki kurang mampu yang putus sekolah dapat dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat hidup mandiri. Kegiatan ini dilaksanakan selama 1 tahun untuk 2 angkatan (160 orang) dengan masing-masing angkatan berjumlah 80 orang terdiri dari:

- Jurusan Otomotif = 40 orang
- Jurusan elektronika = 40 orang
- Jurusan Las Karbit/Listrik = 40 orang
- Jurusan Instalasi Listrik = 40 orang

7) Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti (PSAABR Budi Utama Lubuk Alung);

Pendidikan dan pelatihan anak asuh bagi 75 orang klien PSAABR Budi Utama Lubuk Alung dimaksudkan agar anak asuh yang dibina dan dilayani mendapatkan peningkatan pendidikan yang lebih baik dan mendapat pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas diri sebagai bekal setelah dari Panti Sosial.

8) Pelatihan Keterampilan dan Praktik Belajar bagi Anak Terlantar (PSBR Harapan Padang Panjang);

Pelatihan Keterampilan dan Praktik Belajar Bagi Anak Terlantar di PSBR Harapan Padang Panjang, dimaksudkan agar anak terlantar perempuan kurang mampu yang putus sekolah terpenuhi kebutuhan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan/ keahlian sehingga dapat hidup mandiri dengan norma dan etika. Kegiatan ini dilaksanakan selama 1 tahun untuk 2 angkatan (200 orang anak perempuan) dengan masing-masing angkatan berjumlah 100 orang terdiri dari :

- Jurusan Kostum
- Jurusan Bordir

9) Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti (PSAA Tri Murni);

Pendidikan dan pelatihan bagi 100 orang anak perempuan klien PSAA Tri Murni dimaksudkan agar anak asuh yang dibina dan dilayani mendapatkan peningkatan pendidikan yang lebih baik dan mendapat pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas diri sebagai bekal setelah dari Panti Sosial.

10) Biaya Pendidikan Klien (PSAA Tri Murni);

Pengadaan biaya pendidikan bagi 100 orang anak perempuan klien PSAA Tri Murni terdiri dari belanja peralatan/ perlengkapan, uang sekolah klien dan uang saku klien. Biaya pendidikan dimaksudkan agar kebutuhan pendidikan untuk 1 tahun terpenuhi.

11) Pengadaan bahan Obat-obatan dan Dokter Pakai Habis;

Penyediaan bahan obat-obatan dan dokter pakai habis, telah dilaksanakan selama 1 tahun pada PSAABR Budi Utama Lubuk Alung, PSAA Tri Murni dan PSBR Harapan Padang Panjang, adapun obat-obatan yang disediakan adalah obat-obatan ringan beserta masing-masing seorang tenaga medis.

12) Penyediaan Bahan Pendidikan;

Penyediaan bahan pendidikan bagi klien PSABR Budi Utama Lubuk Alung, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak asuh sebanyak 75 orang anak selama 1 tahun.

13) Pengadaan Makanan dan Minuman;

Pengadaan makanan dan minuman (biaya makan klien) selama 1 tahun pada PSAABR Budi Utama Lubuk Alung, PSAA Tri Murni dan PSBR Harapan Padang Panjang sebanyak 455 orang terdiri dari 155 orang laki-laki, 300 orang perempuan.

h) Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Eks Trauma

Penyandang cacat (disabilitas) adalah seseorang yang mengalami hambatan fisik mental atau fisik dan mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar yang terdiri dari : penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental. Pembinaan para panyandang cacat dilaksanakan secara sistem panti dengan tujuan agar dapat menjamin dan melindungi penyandang disabilitas dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

1) Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Disabilitas;

Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Disabilitas dan Eks Trauma, dilaksanakan selama 1 tahun di Panti Sosial Bina Netera “ Tuah Sakato” Padang untuk klien yang berjumlah 50 orang, tujuan dari pelatihan ini adalah untuk membina dan memperbaiki sikap mental para penyandang cacat netra dari sifat konsumtif kepada sifat produktif, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para penyandang cacat netra sebagai modal dasar dalam menjalani kehidupan ditengah-tengah masyarakat serta untuk terbina dan terentasnya penyandang cacat netra sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya dalam tatanan kehidupan sehari-hari.

Pelatihan yang diberikan berupa pembinaan KUBE dengan memberikan bimbingan, metode dan teknis pelayanan prima kepada pasien serta pembinaan pengelolaan klinik pijat dan pengadministrasian keuangan yang baik.

2) Biaya Makan dan Minum Klien;

Biaya makanan dan minuman klien yang dilaksanakan selama 1 tahun pada PSBG Harapan Ibu Padang dan PSBN Tuah Sakato Padang, dengan jumlah klien 150 orang terdiri dari 92 orang laki-laki dan 58 orang perempuan.

3) Penyediaan bahan Obat-obatan dan Dokter Pakai Habis;

Penyediaan bahan obat-obatan dan dokter pakai habis, pada PSBG Harapan Ibu Padang dan PSBN Tuah Sakato Padang, dilaksanakan selama 1 tahun untuk 150 orang anak berupa penyediaan obat-obatan ringan serta penyediaan seorang tenaga medis yang ditunjuk oleh Puskesmas setempat.

4) Biaya Kelengkapan Klien;

Biaya kelengkapan klien pada PSBG Harapan Ibu Padang dan PSBN Tuah Sakato Padang dengan jumlah kelayan 150 orang anak untuk 1 tahun, biaya kelengkapan ini dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan harian kelayan, kebutuhan praktek dan penyediaan kebutuhan ekstra kurikuler (olahraga, kesenian, pramuka).

5) Pendayagunaan para Penyandang Disabilitas;

Pendayagunaan para penyandang disabilitas yang dilaksanakan di PSBG Harapan Ibu Padang kepada 100 orang klien (50 orang laki-laki dan 50 orang

perempuan) selama 1 tahun, salah satu tujuan dari kegiatan ini adalah untuk dapat mendukung pemenuhan kebutuhan sosial, fisik, mental dan keterampilan bagi anak retardasi mental yang mampu didik dan mampu latih sehingga mereka bisa hidup mandiri di tengah-tengah keluarga dan masyarakat, disamping itu sasaran kegiatan ini juga bagi orang tua kelayan agar mereka dapat melanjutkan proses pelayanan dan rehabilitasi serta pembinaan lanjut sebagai upaya dan rasa tanggungjawab keluarga.

- 6) Bimbingan Sosial dan Pendampingan Jaminan Sosial Penyandang Cacat Berat (JSPC);

Bimbingan Sosial Pendamping Jaminan Sosial Penyandang Cacat Berat (JSPC) dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan pencerahan kepada 66 orang pendamping agar pendamping mengetahui tentang pelaksanaan pemberian bantuan yang diberikan kepada penyandang cacat berat.

- 7) Penguatan Motivasi Penyandang Disabilitas.

Penguatan motivasi penyandang disabilitas bertujuan untuk memberikan motivasi sosial bagi masyarakat terhadap penyandang disabilitas dengan jumlah sasaran 150 orang.

- 8) Rehabilitasi Sosial Terhadap Penyandang Disabilitas melalui Loka Bina Karya (LBK).

Salah satu upaya rehabilitasi sosial terhadap penyandang disabilitas yang dilakukan pemerintah adalah dengan melaksanakan program pelayanan Sosial Penyandang Disabilitas melalui dua pendekatan, yaitu melalui program pelayanan dalam panti dan program pelayanan luar panti. Kedua program ini berjalan secara beriringan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Penyandang Disabilitas. Rehabilitasi sosial terhadap penyandang disabilitas melalui Loka Bina Karya pada tahun 2018 diberikan kepada 15 orang peserta.

- 9) Pemberian Penghargaan bagi Tokoh yang Peduli pada Penyandang Disabilitas;

Kegiatan ini merupakan apresiasi terhadap masyarakat yang peduli terhadap keberadaan para penyandang disabilitas. Pada tahun ini diberikan penghargaan kepada 58 orang tokoh masyarakat.

i) Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Lansia

Panti asuhan lansia adalah lembaga kesejahteraan sosial yang mempunyai tugas memberikan bimbingan dan pelayanan bagi lanjut usia terlantar agar dapat

hidup secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat (Kepmensos No. 50/HUK/2004).

Adapun kegiatan program ini sebagai berikut :

1) Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti Jompo;

Pendidikan dan Pelatihan bagi penghuni panti jompo, di PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin dan PSTW Kasih Sayang Ibu Batusangkar dengan jumlah klien 180 orang (106 orang laki-laki dan 74 orang perempuan). Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bimbingan mental, sosial, keterampilan dan kesenian kepada para lanjut usia terlantar agar mereka dapat menjalani hari tuanya dengan kegiatan yang bermanfaat serta untuk menumbuhkan rasa percaya diri.

2) Biaya Kelengkapan Klien Panti Jompo;

Biaya kelengkapan klien panti jompo, pada PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin dan PSTW Kasih Sayang Ibu Batusangkar dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan harian serta memenuhi bahan pelatihan kelayan lanjut usia, dengan tujuan agar lanjut usia terlantar dapat mengisi hari-hari tuanya dengan kegiatan yang bermanfaat, dilaksanakan selama 1 tahun untuk 180 orang klien terdiri dari 106 orang laki-laki dan 74 orang perempuan.

3) Biaya Makanan dan Minimum Klien di Panti Jompo;

Biaya makan dan minum kelayan Jompo, pada PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin dan PSTW Kasih Sayang Ibu Batusangkar, berjumlah 106 orang di PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin dan 74 orang di PSTW Kasih Sayang Ibu Batusangkar yang dilaksanakan selama 1 tahun.

4) Penyediaan bahan Obat-obatan dan Dokter Pakai Habis;

Penyediaan bahan obat-obatan Jompo, dilaksanakan selama 1 tahun pada PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin dan PSTW Kasih Sayang Ibu Batusangkar sebanyak 180 orang. Adapun obat-obat yang disediakan berupa obat-obatan ringan dan penyediaan seorang tenaga medis yang ditunjuk.

5) Biaya Jasa Penguburan/Pemulangan Klien;

Biaya Jasa Penguburan / Pemulangan Klien, pada PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin dan PSTW Kasih Sayang Ibu Batusangkar selama 1 tahun, yang dipergunakan untuk biaya penguburan dan pemulangan kelayan kepada keluarganya setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan di dalam panti.

6) Bimbingan Teknis dan Pendampingan Jaminan Sosial Lanjut Usia;

Bimbingan Sosial Pendampingan Jaminan Sosial Lanjut Usia, bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap sehingga tercipta kesamaan pandangan dan pemahaman pelaksana di tingkat pusat dan daerah dalam melaksanakan program jaminan sosial lanjut usia secara tepat. Jumlah sasaran sebanyak 85 orang.

7) Lanjut Usia Berkreasi.

Lanjut Usia Berkreasi bertujuan:

- a) Untuk melembaganya nilai-nilai masyarakat agar selalu menghargai keberadaan lanjut usia.
- b) Meningkatnya kesadaran para lanjut usia, keluarga dan masyarakat akan arti pentingnya makna kehidupan berbangsa dan bernegara melalui berbagai kegiatan terpadu antara masyarakat dan pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial.
- c) Termotivasinya dan Bergeraknya lanjut usia, keluarga, organisasi sosial, masyarakat dan dunia usaha dan upaya meningkatkan kesejahteraan lanjut usia dengan mengembangkan jiwa dan semangat kebersamaan keluarga lanjut usia.
- d) Adapun sasaran kegiatan ini sejumlah 250 orang.

j) Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) dengan kegiatan sebagai berikut :

1) Pengadaan Kelengkapan Klien;

Pengadaan kelengkapan (biaya klien) dilaksanakan selama 1 tahun untuk di PSKW Andam Dewi Sukarami Solok yang berjumlah 40 orang, kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan harian klien.

2) Biaya Obat-obatan dan Dokter Pakai Habis;

Biaya obat-obatan, dilaksanakan selama 1 tahun pada PSKW Andam Dewi dengan penyediaan obat-obatan ringan serta tenaga medis, banyaknya sasaran kegiatan ini 40 orang klien.

3) Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial;

Pendidikan dan Pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyakit sosial pada PSKW Andam Dewi Solok, kegiatan ini bertujuan untuk

memulihkan dan mengembangkan tingkah laku positif eks Wanita Tuna Susila sehingga mereka mau dan mampu melakukan fungsi dan peran sosialnya secara wajar serta meningkatkan ketahanan sosial warga binaan terhadap pengaruh buruk lingkungan dengan memberikan bekal agama dan norma etika, sehingga warga binaan dapat menjalankan kehidupan dengan baik sesuai dengan kaidah agama dan etika.

4) Pengadaan Makanan dan Minuman;

Pengadaan makanan dan minuman pada PSKW Andam Dewi Sukarami Solok selama 1 tahun untuk 40 orang.

k) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Kelembagaan Kesejahteraan Sosial merupakan Organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum (UU No.11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial).

Adapun kegiatan program ini sebagai berikut:

1) Bimbingan Jejaring Kerja LKS/ Orsos se-Sumatera Barat dalam rangka Akreditasi.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan pengurus LKS/Orsos sejumlah 28 orang di bidang administrasi manajemen orsos dan bidang pelayanan sosial. Tujuan kegiatan ini adalah :

- a) Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan pengurus LKS/Orsos dalam pengelolaan manajemen kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- b) Meningkatnya kinerja LKS/Orsos dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya menuju kemandirian;
- c) Terwujudnya administrasi LKS/Orsos dengan baik; dan
- d) Terhimpunnya LKS/Orsos yang di akreditasi dan diusulkan pada Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI di Jakarta.

2) Penyuluhan Kesejahteraan Sosial;

Penyuluhan Kesejahteraan Sosial, dilaksanakan bertujuan untuk menyebarluaskan informasi, komunikasi, inovasi dan edukasi melalui media cetak, media elektronik dan televisi terhadap kelompok sasaran ke arah yang

lebih baik serta untuk terwujudnya pemahaman yang sama kepada para pelaku program penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam pelaksanaan penyuluhan sosial guna mendukung keberhasilan program-program dari kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

3) Bimbingan Pengurus Organisasi Sosial se-Sumatera Barat;

Bimbingan bagi Pengurus Organisasi Sosial se Sumatera Barat bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pengurus orsos dalam mengelola manajemen kualitas pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kinerja orsos dalam melaksanakan tugas dan fungsi menuju kemandirian serta mewujudkan administrasi orsos dengan baik. Sasaran kegiatan ini berjumlah 30 orang.

4) Penilaian PSKS (Karang Taruna, Orsos, PSM, TKSK) berprestasi Tingkat Sumatera Barat;

Penilaian PSKS (Karang Taruna, Orsos, PSM, TKSK) Berprestasi Tk. Sumatera Barat bertujuan :

- a) Untuk meningkatkan motivasi dan etos kerja PSKS dalam mengemban misi dan kontribusi bidang pengembangan kesejahteraan sosial di lapangan;
- b) Melihat sejauh mana dedikasi dan prestasi pada PSKS dalam melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial; dan
- c) Untuk menentukan PSKS yang berprestasi Tk. Sumatera Barat.

Sasaran kegiatan ini berjumlah 43 orang.

5) KSN Expo dan Award dalam HKSAN;

KSN Expo dan Award Dalam HKSAN, bertujuan sebagai media publikasi dan promosi berbagai pihak, instansi pemerintah, dunia usaha, organisasi non pemerintah/LSM, dunia pendidikan dan pelaku usaha lain yang melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk upaya menuju Indonesia sejahtera.

6) Penguatan Nilai-Nilai KSN;

Penguatan Nilai-nilai KSN tahun 2018, yang jatuh pada tanggal 20 Desember setiap tahunnya merupakan momentum untuk menumbuhkembangkan dan melestarikan nilai-nilai kesetiakawanan sosial untuk didayagunakan sehingga menjadi bagian dari sikap dan perilaku sehari-hari bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta mendayagunakan peran

aktif masyarakat luas khususnya masyarakat mampu secara melembaga dan berkelanjutan untuk mengatasi dan menanggulangi permasalahan sosial. Pelaksanaan kegiatan ini dalam bentuk pertandingan olah raga yang diikuti oleh 800 orang peserta dengan tema “Kesejahteraan Sosial Harmoni Indonesia”.

- 7) Penguatan Kelembagaan LKKS Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat;

Penguatan Kelembagaan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Sosial (LKKS) se-Sumatera Barat bertujuan memberikan motivasi kepada pengurus LKKS Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam membina dan mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Sasaran kegiatan sejumlah 194 orang pengurus.

- 8) Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Lembaga Kesejahteraan Sosial;
Koordinasi dilaksanakan dengan 19 Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat untuk menguatkan Jejaring Kerja Lembaga kesejahteraan sosial dan temu koordinasi kesejahteraan sosial.

- 9) Penguatan Peran LKS Posdaya dalam Penanggulangan Kemiskinan dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

Tujuan kegiatan ini adalah untuk menanggulangi masalah sosial seperti kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat akan mampu menyelesaikan masalah sosial di lingkungannya sendiri secara bersama-sama, dan bahkan diharapkan dapat secara bersama-sama pula mengembangkan potensi diri sehingga dapat diwujudkan masyarakat maju dan berkembang. Jumlah sasaran sebanyak 960 orang.

- 10) Bimbingan Kapasitas bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan se-Sumatera Barat;

Sasaran kegiatan ini sejumlah 50 orang dengan tujuan membekali kemampuan para TKS dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial di tengah masyarakat.

- 11) Pertemuan Pengurus Karang Taruna se-Sumatera Barat;

Kegiatan ini diikuti oleh 33 orang pengurus Karang Taruna se-Sumatera Barat. Tujuannya untuk meningkatkan koordinasi pengurus Karang Taruna di Sumatera Barat dalam melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial.

- 12) Bimbingan Kapasitas bagi Pengurus Karang Taruna se-Sumatera Barat;

Sasaran kegiatan ini sejumlah 40 orang dengan tujuan membekali kemampuan dan keberfungsian Karang Taruna dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial di tengah masyarakat.

- 13) Pertemuan Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat (FK-PSM) se-Sumatera Barat.

Kegiatan ini bertujuan agar PSM se-Sumatera Barat saling berbagi pengalaman dan menyampaikan permasalahan yang dihadapi serta solusi bagi mereka dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, dimana kegiatan ini diikuti oleh 28 orang.

- 14) Pelatihan Lanjutan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) se-Sumatera Barat;

Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan Pekerja Sosial Masyarakat dalam menjalankan fungsinya. Kegiatan ini diikuti oleh 272 orang PSM se-Sumatera Barat.

- 15) Pelatihan Lanjutan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) se-Sumatera Barat;

Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan Pekerja Sosial Masyarakat dalam menjalankan fungsinya. Kegiatan ini diikuti oleh 272 orang PSM se-Sumatera Barat.

- 16) Pelatihan Dasar Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) se-Sumatera Barat;

Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan Pekerja Sosial Masyarakat dalam menjalankan fungsinya. Kegiatan ini diikuti oleh 25 orang PSM se-Sumatera Barat.

- 17) Sumatera Barat Expo 2018 (Publikasi Pembangunan Kesejahteraan Sosial)

Kegiatan ini dilakukan untuk mempublikasi kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

m) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Sosialisasi Undian Berhadiah Gratis (UGB)

Sosialisasi dilaksanakan pada petugas yang menangani UGD pada Dinas Sosial Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat bertujuan meningkatkan pemahaman tentang UGB dengan jumlah sasaran 25 orang.

- b. Bimbingan Keterampilan Berusaha bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE);

Bimbingan keterampilan bagi keluarga rentan dan WRSE di Sumatera Barat, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan manajemen usaha keluarga (KK) rentan miskin dalam mengelola dan mengembangkan usahanya sehingga dapat membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari-hari. Kegiatan ini diikuti oleh 3.800 orang.

- c. Pelayanan Orang Terlantar;

Kegiatan ini dialokasikan untuk pemulangan orang terlantar sejumlah 28 orang dalam 1 tahun anggaran.

- d. Bimbingan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Komunitas Adat Terpencil;

Bimbingan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Komunitas Adat Terpencil, dilaksanakan dalam rangka menciptakan warga dampingan dan petugas pendamping serta masyarakat eks warga yang terampil mandiri, dalam berusaha guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan memanfaatkan bahan alam yang ada di sekitar kebun dan tanaman masyarakat tersebut. Kegiatan ini diikuti oleh 20 KK warga KAT.

- e. Penetapan Calon Lokasi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT);

Pemberdayaan Komunitas Adat terpencil (PKAT) merupakan salah satu bentuk kepedulian dan komitmen pemerintah dalam mempercepat proses pembangunan terhadap mereka yang masih belum tersentuh proses Pembangunan Nasional yang umumnya berada pada daerah-daerah yang sulit dijangkau. Fokus perhatian Pemberdayaan KAT adalah mereka yang berada di daerah terpencil baik secara geografis, sosial budaya, ekonomi maupun politik. Beberapa tahapan yang dilakukan dalam Pemberdayaan KAT berupa:

- a) Penjajagan Awal, tujuannya adalah untuk (1) menemukan sekaligus menghimpun data etnologi KAT dalam suatu wilayah untuk mendapatkan data awal tentang Komunitas Adat Terpencil, (2) Menghimpun data potensi dan sumber daya alam serta sumber daya manusia, dan (3) Menetapkan katagori Komunitas Adat terpencil sesuai dengan kriteria dan kenyataan di lapangan.

- b) Semiloka Daerah Hasil Studi Kelayakan bertujuan untuk memperoleh masukan bentuk kegiatan Pemberdayaan KAT dan dukungan keterpaduan program dari Dinas/Instansi terkait serta masyarakat maupun Perguruan Tinggi sebagai acuan pelaksanaan pemberdayaan selanjutnya serta membahas kelayakan lokasi sebagai suatu calon lokasi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Sumatera Barat tahun 2018.
- f. Pengadaan Beras Untuk Panti Swasta se-Sumatera Barat;
- Pengadaan Beras Untuk Panti Sosial Swasta bertujuan membantu Panti Sosial swasta dalam memenuhi kebutuhan dasar pangan bagi para penyandang masalah kesejahteraan sosial di dalam Panti dengan jumlah penerima sejumlah 4.000 orang.
- g. Bimbingan Motivasi Sosial/ Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin (dalam rangka HARGANAS);
- Bimbingan motivasi sosial/ keterampilan berusaha bagi keluarga miskin (dalam rangka HARGANAS), bertujuan untuk meningkatkan motivasi berusaha keluarga tidak mampu/miskin dalam meningkatkan keterampilan berusaha serta menggerakkan dan memotivasi masyarakat dalam upaya penanganan permasalahan keluarga dengan mengembangkan jiwa dan semangat kesetiakawananan sosial dalam mewujudkan pembangunan keluarga sejahtera.
- Sementara metode kegiatan adalah Penyuluhan, Kampanye Sosial Keluarga dan Bhakti Sosial yang diikuti oleh 43 orang KK miskin.
- h. Bimbingan Pemantapan Pengurus LK3 Kab/Kota;
- Bimbingan Pemantapan Pengurus LK3 Kab/Kota, bertujuan untuk meningkatkan kinerja Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kab/Kota dan LK3 Berbasis Masyarakat agar lebih profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sebagai tempat layanan informasi, konsultasi rujukan dalam penanganan permasalahan keluarga sesuai dengan kebutuhan, serta sebagai bahan evaluasi bagi Dinas Sosial dari segi mana LK3 masih memiliki kelemahan / kendala dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial, sehingga dapat dijadikan bahan penyusunan program serta langkah-langkah Pemberdayaan Keluarga selanjutnya. Sasaran kegiatan ini sebanyak 43 orang pengurus LK3.

i. Seleksi Penghargaan KUBE dan Pendamping KUBE Berprestasi;

Seleksi dan Penghargaan KUBE dan Pendamping KUBE Berprestasi, merupakan media untuk meningkatkan motivasi pendamping dan warga miskin untuk lebih maju secara ekonomi dan sosial, meningkatkan interaksi dan kerjasama dalam kelompok, mendayagunakan potensi dan sumber daya sosial dan ekonomi lokal, memperkuat budaya kewirausahaan, mengembangkan akses pasar dan menjalin kemitraan sosial ekonomi dengan berbagai pihak. Tujuan dari kegiatan ini adalah:

- a) Untuk mewujudkan penilaian yang obyektif dan partisipatif untuk memungkinkan terjalannya pengalaman, prestasi dalam pengelolaan KUBE FM, serta pendamping berprestasi.
- b) Mewujudkan media tukar pengalaman antar pengurus KUBE, serta pendamping secara kondusif yang dapat menggambarkan perkembangan dan dinamika KUBE serta pendamping.
- c) Mewujudkan kompetisi sehat, spontan dan menjunjung nilai –nilai kebersamaan dalam berprestasi.
- d) Terjalannya KUBE dan Pendamping KUBE Berprestasi Tk. Provinsi Sumatera Barat untuk diikutsertakan pada seleksi tingkat Nasional tahun 2018.
- e) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat fakir miskin yang menjadi anggota kelompok KUBE.

j. Sosialisasi E-Warong dan KUBE Jasa;

Sosialisasi E-Warong dan KUBE Jasa dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan fakir miskin tentang elektronik warung gotong royong (E-Warong). Fasilitas ini untuk memenuhi kebutuhan pangan Keluarga Penerima Manfaat. Sosialisasi ini diikuti oleh 50 orang peserta.

k. Penumbuhan Usaha Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) FM;

Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan.

KUBE FM adalah himpunan dari keluarga yang tergolong fakir miskin yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas dasar prakarsanya sendiri, saling berinteraksi satu sama lain dan tinggal dalam satu wilayah tertentu dengan tujuan meningkatkan produktivitas anggotanya. Pada tahun ini sasaran KUBE FM berjumlah 3.530 kk/ 353 kelompok.

- l. Asistensi Pengembangan UEP Gelandangan/ Pengemis Program Desaku Menanti;

Permasalahan gelandangan dan pengemis ditangani pemerintah melalui program Desaku Menanti. Gelandangan dan pengemis adalah masyarakat urban yang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap sehingga menjadi persoalan yang meresahkan. Gelandangan dan pengemis ini diberikan pelatihan keterampilan di Rumah Kerja Desaku Menanti. Setelah mengikuti pelatihan keterampilan, para peserta diberikan bantuan stimulan Usaha Ekonomi Produktif. Kegiatan ini diikuti oleh 40 orang peserta.

- m. Pemberdayaan UEP bagi Waria/ WTS

Kegiatan ini berupa pemberian bimbingan dan bantuan stimulan Usaha Ekonomi Produktif bagi waria/ WTS. Kegiatan ini diikuti oleh 10 orang peserta.

- n. Pengembangan KUBE melalui program terpadu UMKM Perkotaan

Kegiatan ini dilaksanakan agar KUBE yang diberikan bantuan stimulan dapat meningkatkan kesejahteraan anggota KUBE. Sasaran sejumlah 4 kelompok usaha bersama.

- o. Rapat Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/ Rastra

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau rastra adalah program bantuan pangan untuk masyarakat miskin dengan nilai bantuan Rp110.000 per bulan. Penyaluran bantuan kepada penerima yang berdasarkan basis data terpadu (BDT) melalui Himpunan Bank Negara (Himbara). Rapat monitoring ini diikuti oleh 50 orang peserta.

- p. Rapat Evaluasi Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi BDT Kab/Kota

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau rastra diberikan kepada masyarakat miskin sesuai Basis Data Terpadu (BDT). Agar tepat sasaran dan menjamin kebenaran data maka dilakukan verifikasi dan validasi data

kemiskinan yang ada di kabupaten/ kota. Rapat evaluasi ini diikuti oleh 50 orang peserta.

n) Program Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial

Adapun kegiatan pada program ini sebagai berikut:

- a. Pertemuan Pendamping dan Operator Program Keluarga Harapan;
Program Keluarga harapan (PKH) adalah program bantuan social bersyarat (*conditional cash transfer*) yang diberikan kepada keluarga miskin yang memiliki kondisional kesehatan dan pendidikan. Kegiatan PKH bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan, meningkatkan taraf hidup KPM melalui akses layanan pendidikan dan kemiskinan, mendorong perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam hidup sehat dan pendidikan berkelanjutan, dan mendorong inklusi keuangan bagi masyarakat miskin. Kegiatan ini bertujuan agar meningkatnya pemahaman pendamping dan operator PKH di Kab/Kota sejumlah 38 orang.
- b. Pemantapan Tim Psikososial Korban Bencana Alam;
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Tim Psikososial Korban bencana Alam sejumlah 45 orang.
- c. Pemantapan Tim TRC Bencana Alam;
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Tim TRC Bencana Alam sejumlah 45 orang. Pemantapan Tim TRC Bencana Alam;
- d. Sosialisasi Tingkat Provinsi Program Keluarga Harapan;
Kegiatan ini diberikan kepada petugas Dinas Sosial Kab/Kota terkait pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Kegiatan ini diikuti oleh 48 orang.
- e. Rakor Koordinator Program Keluarga Harapan;
Kegiatan ini diikuti oleh 30 orang koordinator pendamping PKH dan operator Kab/Kota se-Sumatera Barat.
- f. Sosialisasi Program Bencana Sosial;
Kegiatan ini diberikan kepada 50 orang petugas Dinas Sosial Kab/Kota se-Sumatera Barat.
- g. Bantuan Logistik Bencana;
Kegiatan ini berupa penyediaan logistic bencana yang didistribusikan kepada Dinas Sosial Kab/Kota se-Sumatera Barat.

o) Program Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba

Adapun kegiatan pada program ini sebagai berikut:

a. Bimbingan dan Pelatihan Keterampilan dan Bimbingan Sosial Korban NAPZA/HIV

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kepercayaan diri bagi korban HIV dalam menjalankan fungsi sosialnya di masyarakat. Kegiatan yang dilakukan adalah pelatihan keterampilan menyulam dan membuat *handycraft* dari barang-barang bekas tak terpakai untuk melatih korban HIV supaya dapat mengisi waktu dengan kegiatan yang positif dan produktif. Bimbingan ini diikuti oleh 20 orang peserta.

b. Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan Penyakit Menular Seksual (PMS)

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman PSKS tentang penanggulangan Narkoba serta memberikan pengetahuan terhadap pelajar tentang bahaya narkoba dan penyakit menular seksual (PMS). Sasaran kegiatan ini sebanyak 120 orang.

c. Rapat Koordinasi Penguatan Lembaga RBM tentang Korban Penyalahgunaan NAPZA

Rapat ini bertujuan meningkatkan pengetahuan peserta tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat dan Lembaga Kesejahteraan Sosial bagi Korban Penyalahgunaan NAPZA yang diikuti oleh 36 orang peserta.

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Adapun realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yang bersumber dari dana APBD tahun anggaran 2018 dapat dilihat pada Tabel A.2.1 halaman berikutnya.

Tabel A.2.1. Realisasi Program dan Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Dana	Realisasi		
			Fisik (%)	Keuangan	Pers(%)
	BELANJA LANGSUNG	51,339,114,899	95.36%	47,270,992,628	92.08%
	BELANJA LANGSUNG UMUM	9,322,703,488	100.00%	8,851,978,561	94.95%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5,412,623,044	95.34%	5,160,287,750	95.34%
	1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;	104,030,278	100.00%	101,765,700	97.82%
	2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;	811,070,000	100.00%	665,554,909	82.06%
	3) Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengaman, dan Sopir Kantor;	2,175,334,746	100.00%	2,112,740,905	97.12%
	4) Penyediaan Alat Tulis Kantor;	145,876,658	100.00%	145,242,030	99.56%
	5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;	87,176,390	100.00%	87,116,700	99.93%
	6) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;	116,493,297	100.00%	116,476,070	99.99%
	7) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;	378,222,292	100.00%	362,638,015	95.88%
	8) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;	283,572,480	100.00%	277,059,580	97.70%
	9) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	72,136,000	100.00%	72,003,000	99.82%
	10) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	123,686,340	100.00%	109,642,730	88.65%
	11) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah;	841,282,900	100.00%	839,275,611	99.76%
	12) Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi;	37,631,500	100.00%	37,414,500	99.42%
	13) Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur.	89,325,000	100.00%	87,122,000	97.53%
	14) Penyediaan Makanan dan Minuman;	146,785,163	100.00%	146,236,000	99.63%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2,750,526,334	93.83%	2,580,885,076	93.83%
	1) Pengadaan Meubeler;	123,250,000	100.00%	123,250,000	100.00%
	2) Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi;	186,900,000	100.00%	184,875,000	98.92%
	3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi;	10,050,000	100.00%	10,050,000	100.00%
	4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;	443,349,034	100.00%	410,467,725	92.58%
	5) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor;	94,946,000	100.00%	93,627,000	98.61%
	6) Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi;	55,972,000	100.00%	55,953,500	99.97%
	7) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor;	1,240,460,000	100.00%	1,118,382,050	90.16%
	8) Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan;	38,548,000	100.00%	38,468,000	99.79%
	9) Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan;	16,060,000	100.00%	12,659,234	78.82%
	10) Pemeliharaan Sedang/Berat Bangunan Monumen;	200,841,300	100.00%	200,002,567	99.58%

	11) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;	230,000,000	100.00%	224,800,000	97.74%
	12) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;	65,800,000	100.00%	65,800,000	100.00%
	13) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;	44,350,000	100.00%	42,550,000	100.00%
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	159,870,000	100.00%	143,903,200	90.00%
	1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya.	159,870,000	100.00%	143,903,200	90.01%
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	75,360,000	91.00%	68,578,300	91.00%
	1) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.	75,360,000	100.00%	68,578,300	91.00%
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	924,324,110	97.19%	898,324,235	97.19%
	1) Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD;	49,078,965	100.00%	49,070,965	99.98%
	2) Penatausahaan Keuangan SKPD	510,458,445	100.00%	502,178,350	98.38%
	3) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD;	38,648,300	100.00%	26,648,220	68.95%
	4) Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD;	123,343,700	100.00%	119,823,000	97.15%
	5) Penyusunan Sinergitas Program Antar Kab/Kota	59,203,700	100.00%	59,003,700	99.66%
	6) Pengelolaan, Pengawasan, dan Pengendalian Aset OPD	143,591,000	100.00%	141,600,000	98.61%
	BELANJA LANGSUNG WAJIB	42,016,411,411	94.33%	38,419,014,067	91.44%
6	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	217,070,620	93.19%	202,286,823	93.19%
	1) Rujukan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	99,290,700	100.00%	93,196,073	93.86%
	2) Sosialisasi Program Penanganan Anak Berhadapan Hukum (ABH)	36,021,070	100.00%	31,010,900	86.09%
	3) Sosialisasi Perda dan Pergub Disabilitas	26,779,950	100.00%	24,679,950	92.16%
	4) Bimbingan Teknis Satuan Bhakti Pekerja Sosial	54,978,900	100.00%	53,399,900	97.13%
7	Program Pembinaan Anak Terlantar	6,668,077,240	99.07%	6,606,334,232	99.07%
	1) Pengadaan Kelengkapan (Biaya Klien);	688,961,000	100.00%	687,109,500	99.73%
	2) Seleksi Penerimaan Calon Kelayan;	63,133,000	100.00%	63,025,400	99.83%
	3) Rapat Koordinasi Pelayanan dan Rehabilitasi Kesos Anak;	160,264,680	100.00%	159,193,300	99.33%
	4) Sehari Bersama Anak;	31,806,500	100.00%	31,775,100	99.90%
	5) Tim PIPA (Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak)	40,304,800	100.00%	40,139,800	99.59%
	6) Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar (PSAABR Budi Utama Lubuk Alung);	549,634,652	100.00%	548,357,000	99.77%
	7) Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti (PSAABR Budi Utama Lubuk Alung);	239,150,000	100.00%	239,070,000	99.97%
	8) Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar (PSBR Harapan Padang Panjang);	789,201,520	100.00%	763,323,344	96.72%

	9) Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti (Tri Murni);	462,210,050	100.00%	461,110,050	99.76%
	10) Biaya Pendidikan Klien (Tri Murni);	336,496,300	100.00%	306,316,000	91.03%
	11) Penyediaan Obat-obatan dan Jasa Dokter;	26,452,000	100.00%	26,452,000	100.00%
	12) Penyediaan bahan Pendidikan Klien (Budi Utama);	200,028,000	100.00%	200,028,000	100.00%
	13) Pengadaan Makanan dan Minuman;	3,080,434,738	100.00%	3,080,434,738	100.00%
8	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma	2,938,531,175	99.77%	2,931,695,620	99.77%
	1) Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Disabilitas;	423,546,267	100.00%	423,067,500	99.89%
	2) Biaya Makanan dan Minuman Kelayan;	1,443,564,670	100.00%	1,441,457,907	99.85%
	3) Penyediaan Bahan Obat-obatan dan Jasa Dokter;	21,638,100	100.00%	21,569,000	99.68%
	4) Biaya Kelengkapan Klien;	288,755,479	100.00%	288,211,000	99.81%
	5) Pendayagunaan para Penyandang Disabilitas;	455,234,779	100.00%	454,727,320	99.89%
	6) Bimbingan Sosial dan Pendampingan Jaminan Sosial Penyandang Cacat Berat (JSPC);	144,845,900	100.00%	142,166,913	98.15%
	7) Penguatan Motivasi Penyandang Disabilitas.	18,345,130	100.00%	18,345,130	100.00%
	8) Rehabilitasi Sosial terhadap Penyandang Disabilitas melalui Loka Bina Karya (LBK);	96,583,450	100.00%	96,146,950	99.55%
	9) Pemberian Penghargaan bagi Tokoh yang Peduli Penyandang Disabilitas.	46,017,400	100.00%	46,003,900	99.97%
9	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	2,672,534,121	99.84%	2,668,211,921	99.84%
	1) Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti Jompo;	628,796,512	100.00%	628,494,512	99.95%
	2) Biaya Kelengkapan Klien Panti Jompo;	260,578,600	100.00%	259,992,000	99.77%
	3) Biaya Makanan dan Minimum Klien di Panti Jompo;	1,564,063,509	100.00%	1,564,063,509	100.00%
	4) Penyediaan bahan Obat-obatan dan Jasa Dokter;	65,686,000	100.00%	65,686,000	100.00%
	5) Biaya Jasa Penguburan/Pemulangan Klien;	37,000,000	100.00%	35,500,000	95.95%
	6) Bimbingan Teknis Pendampingan Program Jaminan Sosial Lanjut Usia;	84,449,200	100.00%	82,737,700	97.97%
	7) Lanjut Usia Berkreasi.	31,960,300	100.00%	31,738,200	99.31%
10	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	879,396,600	99.94%	878,895,724	99.94%
	1) Pengadaan Kelengkapan Klien;	96,138,000	100.00%	96,138,000	100.00%
	2) Biaya Obat-obatan dan Jasa Dokter;	22,352,000	100.00%	22,352,000	100.00%
	3) Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial;	328,813,900	100.00%	328,315,000	99.85%
	4) Pengadaan Makanan dan Minuman;	432,092,700	100.00%	432,090,724	100.00%
11	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	3,569,775,000	92.48%	3,301,245,187	92.48%
	1) Bimbingan Jejaring Kerja LKS/Orsos se-Sumatera Barat dalam rangka Akreditasi	40,097,800	100.00%	38,651,600	96.39%

	2) Penyuluhan Kesejahteraan Sosial;	32,216,000	100.00%	32,075,000	99.56%
	3) Bimbingan bagi Pengurus Organisasi Sosial se-Sumatera Barat;	35,798,800	100.00%	35,760,800	99.89%
	4) Penilaian PSKS (Karang Taruna, Orsos, PSM, TKSK) berprestasi Tingkat Sumatera Barat;	87,181,000	100.00%	82,279,637	94.38%
	5) KSN Expo dan Award dalam HKSAN;	81,460,000	100.00%	81,275,800	99.77%
	6) Penguatan Nilai-Nilai HKSAN;	161,044,200	100.00%	161,044,000	100.00%
	7) Penguatan Kelembagaan LKKS Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat;	592,969,200	100.00%	533,018,400	89.89%
	8) Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Lembaga Kesejahteraan Sosial	519,783,000	100.00%	499,238,000	96.05%
	9) Penguatan Peran LKS Posdaya dalam Penanggulangan Kemiskinan dan Penyelenggaraan Kesos;	697,525,700	100.00%	664,902,500	95.32%
	10) Bimbingan Kapasitas bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan se-Sumatera Barat	69,458,000	100.00%	69,458,000	100.00%
	11) Pertemuan Pengurus Karang Taruna se-Sumatera Barat	34,973,500	100.00%	34,502,500	98.65%
	12) Bimbingan Kapasitas bagi Pengurus Karang Taruna se-Sumatera Barat	43,408,000	100.00%	43,309,000	99.77%
	13) Pertemuan Forum Komunitas Pekerja Sosial Masyarakat (FK-PSM) se-Sumatera Barat	32,080,500	100.00%	31,325,000	97.64%
	14) Pelatihan Lanjutan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) se-Sumatera Barat	861,073,300	100.00%	736,015,250	85.48%
	15) Pengkajian Gelar Calon Pahlawan Nasional;	70,158,900	100.00%	58,806,500	83.82%
	16) Pelatihan Dasar Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) se-Sumatera Barat	33,364,100	100.00%	32,713,500	98.05%
	17) Sumatera Barat Expo 2018 (Publikasi Pembangunan Kesejahteraan Sosial);	177,183,000	100.00%	166,869,700	94.18%
12	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	24,404,887,505	86.79%	21,181,402,100	86.79%
	1) Sosialisasi Undian Gratis Berhadiah (UGB)	44,966,000	100.00%	44,412,500	98.77%
	2) Bimbingan Keterampilan Berusaha bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE);	12,641,741,150	100.00%	12,172,979,650	96.29%
	3) Pelayanan Orang Terlantar;	16,291,510	100.00%	15,988,200	98.14%
	4) Bimbingan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Komunitas Adat Terpencil	36,878,900	100.00%	36,878,900	100.00%
	5) Penetapan calon Lokasi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT);	77,174,600	100.00%	70,374,600	91.19%
	6) Pengadaan Beras Untuk Panti Swasta se Sumatera Barat	2,350,600,700	100.00%	2,349,260,150	99.94%
	7) Bimbingan Motivasi Sosial/Keterampilan berusaha bagi keluarga miskin (dalam rangka HARGANAS).	65,561,250	100.00%	63,361,250	96.64%
	8) Bimbingan Pemantapan Pengurus LK3 Kab/Kota	81,471,700	100.00%	81,154,300	99.61%
	9) Seleksi Penghargaan KUBE dan Pendamping KUBE Berprestasi;	149,396,290	100.00%	140,811,250	94.25%

	10) Penumbuhan/ Pengembangan Usaha melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Pesisir dan kepulauan;	307,351,350	100.00%	300,216,350	97.68%
	11) Sosialisasi E-Warong dan KUBE Jasa;	56,284,000	100.00%	54,564,000	96.94%
	12) Penumbuhan Usaha melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) FM Pedesaan;	8,127,890,145	70.72%	5,417,795,540	66.66%
	13) Asistensi Pengembangan UEP Gelandangan/ Pengemis Program Desaku Menanti;	103,184,850	100.00%	102,327,050	99.17%
	14) Pemberdayaan UEP bagi waria/ WTS;	43,106,000	100.00%	42,061,100	97.58%
	15) Pengembangan KUBE melalui Program, Terpadu UMKM Perkotaan;	113,180,060	98.94%	111,785,060	98.77%
	16) Rapat Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Non Tunai dan Rastra;	109,442,000	100.00%	98,405,200	89.92%
	17) Rapat Evaluasi Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi BDT Kab/ Kota;	80,367,000	100.00%	79,027,000	98.33%
13	Program Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	497,293,180	97.97%	487,192,210	97.97%
	1) Pertemuan Pendamping dan Operator Program Keluarga Harapan (PKH);	56,270,980	100.00%	56,270,980	100.00%
	2) Pemantapan Tim Psikososial Bencana Alam;	74,321,970	100.00%	74,320,000	100.00%
	3) Pemantapan Tim TRC Bencana Alam;	74,288,770	100.00%	74,288,770	100.00%
	4) Sosialisasi Tingkat Provinsi Program Keluarga Harapan (PKH);	72,737,280	100.00%	64,282,280	88.38%
	5) Rakor Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH);	54,432,980	100.00%	53,860,980	98.95%
	6) Sosialisasi Program Bencana Sosial;	64,324,200	100.00%	63,574,200	98.83%
	7) Bantuan Logistik Bencana;	100,917,000	100.00%	100,595,000	99.68%
14	Program Pencegahan, Penanganan, dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba	168,845,970	86.79%	161,750,250	86.79%
	1) Bimbingan dan Pelatihan Keterampilan dan Bimbingan Sosial Korban NAPZA/ HIV;	83,269,350	100.00%	80,940,400	97.20%
	2) Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan Penyakit Menular Seksual (PMS);	48,167,820	100.00%	43,960,550	91.27%
	3) Rapat Koordinasi Penguatan Lembaga RBM tentang Korban Penyalahgunaan Napza;	37,408,800	100.00%	36,849,300	98.50%
	Jumlah	51,339,114,899	95.36%	47,270,992,628	92.08%

3. Output dan Outcome

Tabel A.3.1. Output dan Outcome

No	Program/Kegiatan	Hasil/ Outcome	Output		
			Kualitatif	Kuantitatif	
				Target	Realisasi
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				95.34%
	1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran Dinas Sosial dan 8 UPTD.	1 tahun	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat di Dinas Sosial dan 8 UPTD.	100.00%
	2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;	Terpenuhinya kebutuhan air bersih, listrik dan komunikasi dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran di Dinas Sosial dan 8 UPTD.	1 tahun	Terlaksananya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik di Dinas Sosial dan 8 UPTD.	100.00%
	3) Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengaman, dan Sopir Kantor;	Terpeliharanya kebersihan dan keamanan, serta terpenuhinya kelancaran mobilitas kantor Dinas dan 8 UPTD	1 tahun	Tersedianya alat-alat kebersihan kantor serta jasa pengaman dan supir kantor di Dinas Sosial dan 8 UPTD	100.00%
	4) Penyediaan Alat Tulis Kantor;	Terpenuhinya administrasi perkantoran Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dan 8 UPTD.	1 tahun	Tersedianya alat tulis kantor di Dinas Sosial dan 8 UPTD.	100.00%
	5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;	Terpenuhinya administrasi perkantoran Dinas Sosial dan UPTD.	1 tahun	Terlaksananya barang cetakan dan penggandaan di Dinas Sosial dan 8 UPTD.	100.00%
	6) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	1 tahun	Terlaksananya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Dinas Sosial dan 8 UPTD.	100.00%
	7) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;	Terpenuhinya Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dan 8 UPTD.	1 tahun	Terlaksananya jasa peralatan dan perlengkapan kantor di Dinas Sosial dan 8 UPTD.	100.00%
	8) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;	Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga kantor Dinas dan 8 UPTD	1 tahun	Terlaksananya peralatan rumah tangga kantor di Dinas Sosial dan 8 UPTD	100.00%
	9) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya pengetahuan umum aparatur di Dinas Sosial dan 8 UPTD.	1 tahun	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan di Dinas Sosial dan 8 UPTD.	100.00%

	10) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya kebutuhan logistik kantor Dinas dan 8 UPTD	1 tahun	Terlaksananya penyediaan logistik kantor di Dinas Sosial dan 8 UPTD	100.00%
	11) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah;	Terjalinnnya koordinasi pelaksanaan pelayanan Dinas Sosial dengan baik	1 tahun	Terlaksananya rapat koordinasi Dinas Sosial dengan instansi terkait dan vertikal secara baik	100.00%
	12) Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi;	Terinformasikan dan terpublikasikannya kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan UPTD kepada masyarakat luas	12 bulan	Terlaksananya Jasa Informasi dan Publikasi Dinas Sosial dan 8 UPTD	100.00%
	13) Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur.	Terpenuhinya kesehatan, mental, spiritual aparat Dinas Sosial dan 8 UPTD	1 tahun	Terlaksananya kesehatan, mental, spiritual aparat Dinas Sosial dan 8 UPTD	100.00%
	14) Penyediaan Makanan dan Minuman;	Terpenuhinya makan minum rapat dan tamu dalam rangka rapat koordinasi	1 tahun	Terlaksananya makan minum rapat dan tamu dalam rangka rapat koordinasi.	100.00%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				93.83%
	1) Pengadaan Meubeleur;	Terpenuhinya meubeler kantor di Dinas Sosial dan 8 UPTD	1 tahun	Terlaksananya penyediaan meubeler di 1 tahun Dinas Sosial dan 8 UPTD	100.00%
	2) Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi;	Terpenuhinya komputer dan jaringan komputerisasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas di Dinas Sosial dan 8 UPTD	5 komputer, 9 laptop, 7 printer	Terlaksananya pengadaan komputer dan jaringan komputerisasi di Dinas Sosial dan 8 UPTD	100.00%
	3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi;	Terpenuhinya Pengadaam Alat Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi di Dinas Sosial dan 8 UPTD	2 kamera digital, 9 televisi, dll	Terlaksananya Pengadaan Alat Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi di Dinas Sosial dan 8 UPTD	100.00%
	4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;	Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional di Dinas Sosial dan 8 UPTD.	18 unit roda empat, 15 unit roda dua, 6 roda tiga, 5 roda enam	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional di Dinas Sosial dan 8 UPTD.	100.00%
	5) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor;	Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor di Dinas Sosial dan 8 UPTD.	18 unit	Telaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor di Dinas Sosial dan 8 UPTD	100.00%

	6) Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi;	Terpenuhinya pemeliharaan komputer & jaringan komputerisasi di Dinas Sosial dan 8 UPTD.	96 unit	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala komputer & jaringan komputerisasi di Dinas Sosial dan 8 UPTD.	100.00%
	7) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor;	Terpeliharanya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	22 unit	Terlaksananya rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	100.00%
	8) Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan;	Terpenuhinya pemeliharaan instalasi listrik, telepon dan air secara rutin di Dinas Sosial dan 8 UPTD	1 tahun	Terlaksananya pemeliharaan instalasi listrik, telepon dan air di Dinas Sosial dan 8 UPTD	100.00%
	9) Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan;	Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan Dinas Operasional Pejabat Eselon II di Dinas Sosial	1 unit	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan Dinas Operasional Pejabat Eselon II di Dinas Sosial	100.00%
	10) Pemeliharaan Sedang/Berat Bangunan Monumen;	Terpenuhinya pemeliharaan taman makam pahlawan dengan baik	1 TMP	Terlaksananya pemeliharaan taman makam pahlawan Sumatera Barat	100.00%
	11) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;	Terpenuhinya pengangkutan sampah pada Dinas Sosial	1 unit	Terlaksananya pengadaan mobi operasional pada PSBGHI	100.00%
	12) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;	Terpenuhinya gedung kantor	15 unit	Tersedianya gedung kantor	100.00%
	13) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	17 unit	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00%
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				100.00%
	1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya.	Terpenuhinya pakaian dinas pegawai dan PTT Dinas Sosial	288 stel	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	100.00%
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				91.00%
	1) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.	Meningkatnya pengetahuan pegawai dinas sosial dan UPTD yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	6 bimtek/ sosialisasi	Dapat diikutsertakan para pegawai pada bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	100.00%
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				97.19%
	1) Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD;	Terpenuhinya rencana program dan kegiatan dinas sosial	14 program	Terlaksananya penyusunan rencana kerja dan anggaran kegiatan dinas sosial	100.00%

	2) Penatausahaan Keuangan SKPD	Meningkatnya motivasi kinerja pengelola keuangan SKPD Dinas Sosial dan UPTD	1 tahun	Terlaksananya honorarium pengelola keuangan SKPD Dinas Sosial dan UPTD	100.00%
	3) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD;	Terpenuhinya laporan kinerja dinas sosial tahun anggaran 2018	12 bulan	Telaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dinas sosial	100.00%
	4) Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD;	Diketahuinya perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan SKPD di Kab/Kota	14 program	Terlaksananya monitoring dan evaluasi program dan kegiatan SKPD	100.00%
	5) Penyusunan Sinergitas Program Antar Kab/Kota	Terpenuhinya Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020	Renstra Dinas Sosial Tahun 2016-2020	Terlaksananya rangkaian penyusunan Renstra Dinas Sosial Tahun 2016-2020	100.00%
	6) Pengelolaan, Pengawasan, dan Pengendalian Aset OPD	Meningkatnya kinerja pengelola aset	1 tahun	Terlaksananya pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian aset dan pembayaran honorarium pengelola aset SKPD Dinas Sosial dan UPTD	100.00%
	BELANJA LANGSUNG WAJIB				94.33%
6	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				93.19%
	1) Rujukan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Terpenuhinya pelayanan dan rehabilitasi sosial terhadap klien penyandang disabilitas (ODK) dari Prov.Sumatera Barat ke Panti Rujukan Rehabilitas Sosial	10 orang penyandang disabilitas	Terlaksananya koordinasi dan pengiriman penyandang disabilitas untuk mengikuti rehabilitasi sosial di Panti Sosial Rujukan	100.00%
	2) Sosialisasi Program Penanganan Anak Berhadapan Hukum (ABH)	Terjalinnnya koordinasi penanganan ABH dengan pihak terkait	30 orang	Terlaksananya sosialisasi program penanganan ABH	100.00%
	3) Sosialisasi Perda dan Pergub Disabilitas	Meningkatnya pengetahuan tentang perda/ pergub disabilitas	60 orang	Terlaksananya Sosialisasi Perda dan Pergub Disabilitas	100.00%
	4) Bimbingan Teknis Satuan Bhakti Pekerja Sosial	Terpenuhinya bimbingan teknis bagi sakti peksos	30 orang	Terlaksananya Bimbingan Teknis Satuan Bhakti Pekerja Sosial	100.00%
7	Program Pembinaan Anak Terlantar				99.07%
	1) Pengadaan Kelengkapan (Biaya Klien);	Terpenuhinya kelengkapan anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi melalui UPTD PSAABR Budi Utama Lubuk Alung, PSAA Tri Murni Padang Panjang, dan PSBR Harapan Padang Panjang	455 orang (155 org laki-laki, 300 org perempuan)	Tersedianya bahan kelengkapan anak terlantar	100.00%

	2) Seleksi Penerimaan Calon Kelayan;	Terciptanya kondisi calon kelayan yang disyaratkan	1 kegiatan	Terlaksananya seleksi Penerimaan Calon Kelayan	100.00%
	3) Rapat Koordinasi Pelayanan dan Rehabilitasi Kesos Anak;	Terjalinnnya koordinasi antarpengurus panti sosial kab/ kota	125 orang	Terlaksananya Rapat Koordinasi Pelayanan dan Rehabilitasi Kesos Anak	100.00%
	4) Sehari Bersama Anak;	Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap anak	200 orang	Terlaksananya penyelenggaraan sehari bersama anak	100.00%
	5)Tim PIPA (Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak)	Terjalinnnya koordinasi dengan instansi terkait dalam izin pengangkatan anak	25 orang	Terciptanya tim pertimbangan izin pengangkatan anak	100.00%
	6) Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar (PSAABR Budi Utama Lubuk Alung);	Meningkatnya keterampilan dan praktik belajar kerja bagi anak terlantar untuk melakukan usaha kerja	160 orang	Terlaksananya Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar (PSAABR Budi Utama Lubuk Alung) sebanyak 2 angkatan	100.00%
	7) Pendidikan dan Pelatihanbagi Penghuni Panti (PSAABR Budi Utama Lubuk Alung);	Meningkatnya pendidikan dan pelatihan anak asuh di PSAABR Budi Utama Lubuk Alung	75 orang	Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan anak asuh di PSAABR Budi Utama Lubuk Alung	100.00%
	8) Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar (PSBR Harapan Padang Panjang);	Terpenuhinya keterampilan anak terlantar di PSBR Harapan Padang Panjang	200 orang (perempuan)	Terlaksananya keterampilan dan praktek belajar kerja bagi Anak Terlantar di PSBR Harapan Padang Panjang	100.00%
	9) Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti (Tri Murni);	Meningkatnya pengetahuan anak asuh yang dilayani di PSAA Tri Murni Padang Panjang Dalam Panti	100 orang (perempuan)	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan anak asuh	100.00%
	10) Biaya Pendidikan Klien (Tri Murni);	Terpenuhinya kebutuhan pendidikan anak terlantar yang dilayani dalam panti	100 orang (perempuan)	Tersedianya penyediaan biaya pendidikan anak asuh sesuai dengan kebutuhan sekolah	100.00%
	11) Penyediaan Obat-obatan dan Jasa Dokter;	Terpenuhinya kebutuhan obat-obatan kelayan di UPTD PSAABR Budi Utama Lubuk Alung, PSAA Tri Murni Padang Panjang, dan PSBR Harapan Padang Panjang	455 orang (155 org laki-laki, 300 org perempuan)	Tersedianya obat-obatan dan jasa dokter untuk kelayan di panti.	100.00%
	12) Penyediaan bahan Pendidikan Klien (Budi Utama);	Terpenuhinya kebutuhan bahan pendidikan klien di PSAABR Budi Utama.	160 orang	Tersedianya bahan pendidikan klien di PSAABR Budi Utama.	100.00%
	13) Pengadaan Makanan dan Minuman;	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman kelayan di UPTD PSAABR Budi Utama Lubuk Alung, PSAA Tri Murni Padang Panjang, dan PSBR Harapan Padang Panjang	455 orang (155 org laki-laki, 300 org perempuan)	Terlaksananya pengadaan makanan dan minuman kelayan di UPTD PSAABR Budi Utama Lubuk Alung, PSAA Tri Murni Padang Panjang, dan PSBR Harapan Padang Panjang	100.00%
8	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat				99.77%

	dan Eks Trauma				
	1) Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Disabilitas;	Terpenuhinya kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi kelayan tuna netra di PSBN Tuah Sakato Padang	50 orang	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	100.00%
	2) Biaya Makanan dan Minuman Kelayan;	Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum di PSBN Tuah Sakato Padang dan PSBGHI Padang	150 orang (92 org laki-laki, 58 org perempuan)	Terlaksananya biaya makan dan minum kelayan penyandang cacat dalam panti	100.00%
	3) Penyediaan Bahan Obat-obatan dan Jasa Dokter;	Terpeliharanya kesehatan anak cacat di PSBN Tuah Sakato Padang dan PSBGHI	150 orang (92 org laki-laki, 58 org perempuan)	Terlaksananya pengadaan bahan obat-obatan	100.00%
	4 Biaya Kelengkapan Klien;	Terpenuhinya kebutuhan kelengkapan kelayan di PSBN Tuah Sakato Padang dan PSBGHI Padang	150 orang (92 org laki-laki, 58 org perempuan)	Terlaksananya pengadaan biaya kelengkapan kelayan	100.00%
	5) Pendayagunaan para Penyandang Disabilitas;	Meningkatnya kemandirian serta keberfungsian sosial anak cacat	100 orang	Terlaksananya pendayagunaan para penyandang cacat da eks trauma	100.00%
	6) Bimbingan Sosial dan Pendampingan Jaminan Sosial Penyandang Cacat Berat (JSPC);	Meningkatnya pengetahuan pendamping dalam rangka mendampingi penerima jaminan sosial terhadap penyandang disabilitas berat	66 orang	Terlaksananya bimbingan sosial pendampingan jaminan sosial penyandang disabilitas	100.00%
	7) Penguatan Motivasi Penyandang Disabilitas.	Adanya kepedulian masyarakat terhadap penyandang disabilitas	1 kegiatan	Terlaksananya bimbingan penguatan motivasi penyandang disabilitas	100.00%
	8) Rehabilitasi Sosial terhadap Penyandang Disabilitas melalui Loka Bina Karya (LBK);	Meningkatnya keterampilan penyandang disabilitas yang sudah dilatih melalui Loka Bina Karya untuk bisa melakukan usaha kerja untuk melangsungkan kehidupannya di tengah masyarakat sehingga mempunyai fungsi sosial di masyarakat	15 orang	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial terhadap Penyandang Disabilitas melalui Loka Bina Karya (LBK)	100.00%
	9) Pemberian Penghargaan bagi Tokoh yang Peduli Penyandang Disabilitas.	Terpenuhinya Pemberian Penghargaan bagi Tokoh yang Peduli Penyandang Disabilitas.	58 orang	Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi Tokoh yang Peduli Penyandang Disabilitas.	100.00%
9	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo				99.84%
	1) Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti Jompo;	Meningkatnya kemandirian lanjut usia di PSTW Sabai nan aluih sicincin dan PSTW Kasih Sayang Cubadak	180 orang (106 org laki-laki, 74 org perempuan)	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi penghuni Panti Jompo	100.00%

	2) Biaya Kelengkapan Klien Panti Jompo;	Terpenuhinya kelengkapan kelayan di PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin dan PSTW Kasih Sayang Ibu	180 orang (106 org laki-laki, 74 org perempuan)	Terlaksananya pengadaan bahan kelengkapan kelayan lanjut usia di PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin dan PSTW Kasih Sayang Ibu	100.00%
	3) Biaya Makanan dan Minimum Klien di Panti Jompo;	Terpenuhinya Kebutuhan Makan kelayan PSTW Kasih Sayang Ibu Batusangkar dan PSTW Sabai Nan Aluih	180 orang (106 org laki-laki, 74 org perempuan)	Terlaksananya pengadaan makan dan minum kelayan jompo di PSTW Kasih Sayang Ibu Batusangkar dan PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin	100.00%
	4) Penyediaan bahan Obat-obatan dan Jasa Dokter;	Terpenuhinya kebutuhan obat-obatan kelayan di PSTW Kasih Sayang Ibu Batu Sangkar dan PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin	180 orang (106 org laki-laki, 74 org perempuan)	Terlaksananya pengadaan Obat-obatan kelayan di PSTW Kasih Sayang Ibu Batu Sangkar dan PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin	100.00%
	5) Biaya Jasa Penguburan/Pemulangan Klien;	Terpenuhinya pemakaman dan pemulangan kelayan kepada keluarganya	1 tahun	Terlaksananya jasa pemakaman dan pemulangan kelayan	100.00%
	6) Bimbingan Teknis Pendampingan Program Jaminan Sosial Lanjut Usia;	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pendamping program jaminan sosial lanjut usia sesuai pedoman kerja	20 orang	Terlaksananya bimbingan teknis pendampingan program jaminan sosial lanjut usia	100.00%
	7) Lanjut Usia Berkreasi.	Meningkatnya kepedulian masyarakat luas terhadap lanjut usia	1 kegiatan	Terlaksananya kegiatan lanjut usia berkreasi	100.00%
10	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)				99.94%
	1) Pengadaan Kelengkapan Klien;	Terpenuhinya kelengkapan eks tuna susila PSKW Andam Dewi Solok	40 orang (perempuan)	Terlaksananya pengadaan kelengkapan klien	100.00%
	2) Biaya Obat-obatan dan Jasa Dokter;	Terpenuhinya obat-obatan kelayan eks tuna susila PSKW Andam Dewi Solok	40 orang (perempuan)	Terlaksananya pengadaan obat-obatan	100.00%
	3) Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial;	Terpenuhinya kebutuhan pangan klien eks tuna susila pada PSKW Andam Dewi Solok	40 orang (perempuan)	Terlaksananya pengadaan makan dan minuman bagi eks tuna susila	100.00%
	4) Pengadaan Makanan dan Minuman;	Meningkatnya keterampilan berusaha bagi kelayan eks penyandang penyakit sosial	40 orang (perempuan)	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha eks penyandang penyakit sosial	100.00%
11	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial				92.48%

	1) Bimbingan Jejaring Kerja LKS/Orsos se-Sumatera Barat dalam rangka Akreditasi	Termotivasinya pengurus organisasi sosial untuk meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial dan kesiapan akreditasi	28 orang	Terlaksananya Bimbingan Jejaring Kerja LKS/Orsos se-Sumatera Barat dalam rangka Akreditasi	100.00%
	2) Penyuluhan Kesejahteraan Sosial;	Terinformasikannya program pembangunan kesejahteraan sosial kepada masyarakat	30 paket	Terlaksananya penyuluhan sosial melalui berbagai media	100.00%
	3) Bimbingan bagi Pengurus Organisasi Sosial se-Sumatera Barat;	Termotivasinya pengurus organisasi sosial untuk meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat	45 orang	Terlaksananya bimbingan bagi pengurus organisasi sosial se Sumatera Barat	100.00%
	4) Penilaian PSKS (Karang Taruna, Orsos, PSM, TKSK) berprestasi Tingkat Sumatera Barat;	Termotivasinya para Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) untuk meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat	1 kegiatan	Terlaksananya penilaian Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) berprestasi tingkat Sumatera Barat	100.00%
	5) KSN Expo dan Award dalam HKSNI;	Terpublikasikannya kepada masyarakat umum tentang pembangunan kesejahteraan sosial yang telah dilaksanakan dan terjalinnnya koordinasi dengan mitra kerja pelaksana program pembangunan kesejahteraan sosial	1 kegiatan	Dapat ikut sertakannya Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dalam rangka memeriahkan pameran Kesetiakawanan Sosial Nasional (KSN) Expo dan Awards di Jakarta	100.00%
	6) Penguatan Nilai-Nilai HKSNI;	Terpenuhinya Penguatan Nilai-Nilai Kesetiakawanan Sosial Nasional (KSN)	1 kegiatan	Terlaksananya Penguatan Nilai-Nilai Kesetiakawanan Sosial Nasional (KSN)	100.00%
	7) Penguatan Kelembagaan LKKS Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat;	Termotivasinya pengurus LKKS Provinsi dan Kab/Kota dalam membina dan mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan kegiatan sosial	500 orang pengurus LKKS, LKS & peserta KNKS VIII	Terlaksananya kegiatan penguatan kelembagaan LKKS provinsi dan kab/kota Sumatera Barat	100.00%
	8) Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Lembaga Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya jaringan kerja lembaga koordinasi kesejahteraan sosial dan LKS dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Kesejahteraan sosial	19 Kab/Kota, dan 2 kegiatan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan lembaga koordinasi kesejahteraan sosial	100.00%
	9) Penguatan Peran LKS Posdaya dalam Penanggulangan Kemiskinan dan Penyelenggaraan Kesos;	Termotivasinya pengurus posdaya dalam penanggulangan kemiskinan	960 orang	Terlaksananya penguatan peran LKS Posdaya	100.00%
	10) Bimbingan Kapasitas bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan se-Sumatera Barat	Termotivasinya TKSK untuk meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat	50 orang	Terlaksananya Bimbingan Kapasitas bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan se-Sumatera Barat	100.00%

	11) Pertemuan Pengurus Karang Taruna se-Sumatera Barat	Termotivasinya pengurus Karang Taruna untuk meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat	33 orang	Terlaksananya Pertemuan Pengurus Karang Taruna se-Sumatera Barat	100.00%
	12) Bimbingan Kapasitas bagi Pengurus Karang Taruna se-Sumatera Barat	Termotivasinya pengurus Karang Taruna untuk meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat	40 orang	Terlaksananya Bimbingan Kapasitas bagi Pengurus Karang Taruna se-Sumatera Barat	100.00%
	13) Pertemuan Forum Komunitas Pekerja Sosial Masyarakat (FK-PSM) se-Sumatera Barat	Terinformasikannya program pembangunan kesejahteraan sosial kepada masyarakat.	28 orang	Terlaksananya Pertemuan Forum Komunitas Pekerja Sosial Masyarakat (FK-PSM) se-Sumatera Barat	100.00%
	14) Pelatihan Lanjutan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) se-Sumatera Barat	Meningkatnya kemampuan dan keterampilan PSM dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial	272 orang	Terlaksananya pelatihan Lanjutan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang telah mengikuti pelatihan dasar	100.00%
	15) Pengkajian Gelar Calon Pahlawan Nasional;	Rekomendasi nama calon pahlawan daerah	3 orang	Terlaksananya Pengkajian Gelar Calon Pahlawan Nasional;	100.00%
	16) Pelatihan Dasar Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) se-Sumatera Barat	Terinformasinya program pembangunan kesejahteraan sosial kepada masyarakat	25 orang	Terlaksananya pelatihan dasar PSM	100.00%
	17) Sumatera Barat Expo 2018 (Publikasi Pembangunan Kesejahteraan Sosial);	Terinformasikan dan terpublikasikannya kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan UPTD kepada masyarakat luas	1 kegiatan	Tersedianya jasa informasi dan publikasi	100.00%
12	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya				86.79%
	1) Sosialisasi Undian Gratis Berhadiah (UGB)	Meningkatnya pemahaman tentang Sosialisasi Undian Gratis Berhadiah (UGB)	25 orang	Terlaksananya sosialisasi undian gratis berhadiah	100.00%
	2) Bimbingan Keterampilan Berusaha bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE);	Meningkatnya kesejahteraan keluarga rentan dan wanita usaha bersama rawan sosial ekonomi (WRSE)	3.800 orang	Terlaksananya bantuan stimulan usaha ekonomi produktif bagi keluarga rentan dan wanita rawan sosial ekonomi	100.00%
	3) Pelayanan Orang Terlantar;	Meningkatkan pelayanan kepada orang terlantar	28 orang	Terlaksananya pelayanan orang terlaksana	100.00%
	4) Bimbingan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Komunitas Adat Terpencil	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan warga Komunitas Adat Terpencil dalam pengembangan	20 KK/ warga KAT	Terlaksananya Bimbingan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Komunitas Adat Terpencil	100.00%

5) Penetapan calon Lokasi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT);	Adanya rekomendasi calon lokasi Pemberdayaan KAT tahun 2016	1 rekomendasi	Terlaksananya penetapan calon lokasi Pemberdayaan	100.00%
6) Pengadaan Beras Untuk Panti Swasta se Sumatera Barat	Terpenuhinya pemberian kebutuhan pangan beras bagi kelayan dalam panti sosial swasta se Sumatera Barat	4.000 orang	Terlaksananya pengadaan beras untuk panti sosial swasta	100.00%
7) Bimbingan Motivasi Sosial/Keterampilan berusaha bagi keluarga miskin (dalam rangka HARGANAS).	Meningkatnya jumlah keluarga rentan dan masyarakat yang mendapat bimbingan motivasi sosial dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dalam mengatasi masalah yang dialaminya	43 orang	Terlaksananya bimbingan motivasi sosial dan kesejahteraan keluarga bagi keluarga miskin	100.00%
8) Bimbingan Pemantapan Pengurus LK3 Kab/Kota	Meningkatnya pengetahuan dan profesionalisme pengurus LK3 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya	43 orang pengurus	Terlaksananya bimbingan pemantapan bagi pengurus LK3 di 19 Kab/Kota	100.00%
9) Seleksi Penghargaan KUBE dan Pendamping KUBE Berprestasi;	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat fakir miskin menjadi Kelompok Usaha Bersama	42 orang	Terlaksananya Seleksi Penghargaan KUBE dan Pendamping KUBE Berprestasi;	100.00%
10) Penumbuhan/ Pengembangan Usaha melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Pesisir dan kepulauan;	Meningkatnya kesejahteraan kelompok melalui Kelompok Usaha Bersama	8 Klp/ 8KK	Terlaksananya Bantuan Usaha melalui Kelompok Usaha Bersama	100.00%
11) Sosialisasi E-Warong dan KUBE Jasa;	Meningkatnya pengetahuan pendamping fakir miskin tentang E-Warong dan KUBE Jasa	50 orang	Terlaksananya Sosialisasi E-Warong dan KUBE Jasa	100.00%
12) Penumbuhan Usaha melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) FM Pedesaan;	Meningkatnya kesejahteraan kelompok melalui Kelompok Usaha Bersama	3.530 kk/ 353 klp	Terlaksananya Bantuan Usaha melalui Kelompok Usaha Bersama	70.72%
13) Asistensi Pengembangan UEP Gelandangan/ Pengemis Program Desaku Menanti;	Meningkatnya kemampuan berusaha penerima bantuan UEP Gelandangan/ Pengemis Program Desaku Menanti;	40 orang	Terlaksananya pemberian bantuan UEP Gelandangan/ Pengemis Program Desaku Menanti;	100.00%
14) Pemberdayaan UEP bagi waria/ WTS;	Meningkatnya kemampuan berusaha penerima bantuan UEP Waria/ WTS	10 orang	Terlaksananya pemberian bantuan UEP bagi waria/ WTS	100.00%
15) Pengembangan KUBE melalui Program, Terpadu UMKM Perkotaan;	Meningkatnya kesejahteraan kelompok melalui Kelompok Usaha Bersama	4 klp	Terlaksananya Bantuan Usaha melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) FM Perkotaan	98.94%
16) Rapat Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Non Tunai dan Rastra;	Terpantau dan terevaluasinya pelaksanaan program dan kegiatan BPNT/ Rastra	50 orang	Terlaksananya koordinasi program dan kegiatan BPNT/ Rastra Provinsi dengan tim BPNT/ Rastra Kab/ Kota se-Sumbar	100.00%

	17) Rapat Evaluasi Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi BDT Kab/ Kota;	Terpantaunya pelaksanaan verifikasi dan validasi data BDT Kab/ Kota	50 orang	Terlaksananya rapat evaluasi pelaksanaan verifikasi dan validasi data BDT Kab/ Kota	100.00%
13	Program Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial				97.97%
	1) Pertemuan Pendamping dan Operator Program Keluarga Harapan (PKH);	Meningkatnya kinerja pendamping dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)	38 orang	Terlaksananya Pertemuan Pendamping dan Operator Program Keluarga Harapan (PKH);	100.00%
	2) Pemantapan Tim Psikososial Bencana Alam;	Meningkatnya pemahaman Tim Psikososial Bencana Alam	45 orang	Terlaksananya Pemantapan Tim Psikososial Bencana Alam;	100.00%
	3) Pemantapan Tim TRC Bencana Alam;	Meningkatnya pemahaman Tim TRC Bencana Alam	45 orang	Terlaksananya Pemantapan Tim TRC Bencana Alam;	100.00%
	4) Sosialisasi Tingkat Provinsi Program Keluarga Harapan (PKH);	Meningkatnya kinerja pendamping dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Kab/kota	48 orang	Terlaksananya Sosialisasi Tingkat Provinsi Program Keluarga Harapan (PKH);	100.00%
	5) Rakor Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH);	Meningkatnya kinerja pendamping dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)	30 orang	Terlaksananya Rakor Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH);	100.00%
	6) Sosialisasi Program Bencana Sosial;	Meningkatnya pemahaman Petugas Penanganan Bencana Sosial	50 orang	Terlaksananya Sosialisasi Program Bencana Sosial;	100.00%
	7) Bantuan Logistik Bencana;	Meningkatnya Bantuan Logistik Bencana;	1 kegiatan	Terlaksananya pengadaan Bantuan Logistik Bencana;	100.00%
14	Program Pencegahan, Penanganan, dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba				86.79%
	1) Bimbingan dan Pelatihan Keterampilan dan Bimbingan Sosial Korban NAPZA/ HIV;	Meningkatnya kepercayaan diri korban HIV	20 orang	Terlaksananya bimbingan sosial bagi korban HIV	100.00%
	2) Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan Penyakit Menular Seksual (PMS);	Meningkatnya pengetahuan PSKS/ Masyarakat tentang penanggulangan narkoba dan PMS	120 orang	Terlaksananya Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan Penyakit Menular Seksual (PMS);	100.00%
	3) Rapat Koordinasi Penguatan Lembaga RBM tentang Korban Penyalahgunaan Napza;	Meningkatnya pengetahuan peserta tentang penanganan penyalahgunaan NAPZA	36 orang	Terlaksananya Koordinasi Penguatan Lembaga RBM tentang Korban Penyalahgunaan Napza;	100.00%
	Jumlah				95.36%

4. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Penyelenggaraan urusan wajib yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat secara keseluruhan terlaksana dengan baik sesuai dengan yang telah direncanakan serta fisik kegiatan dapat terealisasi sesuai target. Namun, dari 14 program dan 119 kegiatan, terdapat 3 (tiga) kegiatan dengan realisasi fisik tidak mencapai 100% yakni sebagai berikut:

1. Penumbuhan Usaha melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin Pedesaan khusus penambahan Pokir di Perubahan Anggaran 2018. Hal ini disebabkan karena dana teranggarkan di Perubahan sementara waktu untuk pelaksanaan dengan sistem tender tidak mencukupi.
2. Kegiatan Pelatihan lanjutan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) se-Sumatera Barat. Hal ini disebabkan lokasi kegiatan di Kabupaten 50 Kota tidak dapat dilaksanakan karena sasaran tidak sesuai dengan ketentuan.
3. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor, yakni Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor, pada PSAA Tri Murni dan PSBR Harapan. Hal ini disebabkan terdapat pada pembuatan AMDAL tidak dapat dilaksanakan karena tidak tertampung dalam RKPM.

b. Solusi

Solusi yang dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan kegiatan ini kembali diusulkan Tahun Anggaran 2019 dengan data yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.

II. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

A. Tugas Pembantuan yang diterima

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum dari pelaksanaan Tugas Pembantuan adalah sebagai berikut :

- a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; dan
- b) DIPA Kementerian Sosial RI Nomor : SP DIPA- 027.03.3.089029/2018 dan SP DIPA- 027.03.4.089141/2018

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Tugas Pembantuan yang diterima oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat berasal dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.

3. Satuan Kerja Perangkat daerah yang Melaksanakan

Tugas Pembantuan (TP) Kementerian Sosial RI tahun 2018 dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.

4. Program dan Kegiatan yang diterima dan pelaksanaannya.

Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

a) Program Pemberdayaan Sosial dengan kegiatan :

Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil yang dilaksanakan dengan menyediakan rumah bagi warga KAT sebanyak 93 unit, memberikan bantuan jaminan hidup untuk 93 KK, memberikan bantuan peralatan (kerja & rumah tangga) dan bibit tanaman keras dan sertifikasi lahan bagi 93 KK warga KAT, serta menyediakan infrastruktur lainnya bagi warga KAT di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

5. Jumlah Anggaran

Jumlah anggaran Tugas Pembantuan tahun 2018 sebesar : **Rp. 3.554.282.000,-**

6. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Realisasi Program Pemberdayaan Sosial sebagai berikut :

a) Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT) dengan Sub Kegiatan yang dilaksanakan:

- 1) Pembangunan Rumah Sederhana bagi Warga KAT sebanyak 93 Unit di Dusun Sirua Monga, Desa Saibi, Kecamatan Siberut Tengah, Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- 2) Bantuan Jaminan Hidup bagi Warga KAT untuk 93 KK di Dusun Sirua Monga, Desa Saibi, Kecamatan Siberut Tengah, Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- 3) Bantuan Bibit Tanaman bagi Warga 93 Paket di Dusun Sirua Monga;
- 4) Bantuan Peralatan Kerja bagi Warga, 93 Paket di Dusun Sirua Monga;
- 5) Bantuan Peralatan Rumah Tangga untuk 93 Paket di Dusun Sirua Monga;

Realisasi Fisik Kegiatan = Rp. 3.554.282.000,- (100%) dan Realisasi Keuangan sebesar = Rp. 3.130.360.250,- (88,07%).

7. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Kegiatan Tugas Pembantuan yang sifatnya Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat hanya sebagai pelaksana, petunjuk kegiatan dan kerangka acuan di buat oleh Kementerian Sosial.

Untuk pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan tahun 2018 secara prinsip tidak terdapat permasalahan, semua kegiatan dapat berjalan sesuai waktunya dan rencana yang telah ditetapkan.

III. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Program kesejahteraan sosial dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial (UU No 11 Tahun 2009 pasal 1 dan 2).

Pembangunan Kesejahteraan Sosial merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pembangunan Nasional. Pembangunan Kesejahteraan Sosial berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dalam hal ini diemban oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat karena urusan sosial merupakan urusan yang menyangkut kepada pelayanan dasar terhadap masyarakat, khususnya bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Program pembangunan kesejahteraan sosial yang dirancang dalam Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021, pada tahun 2018 ini telah berjalan untuk tahun ke-3. Hasil yang dicapai dari program kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial telah dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosial kelompok masyarakat sasaran yang sangat rentan.

B. SARAN

- 1) Koordinasi dengan Kab/Kota terkait *updating* data PMKS sebagai dasar penyusunan program/kegiatan baik dari dana dekonsentrasi maupun dana desentralisasi, hal ini diharapkan untuk meminimalisir kesalahan dalam penentuan sasaran.

Padang, Januari 2019

Kepala Dinas

H. Abdul Gafar, SE.,MM.
NIP. 19601225 198303 1 010